



RENCANA KERJA 2024

[SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI]

ABSTRACT

[Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024]

SATPOL PP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga rencana kerja ini dapat terselesaikan. Dengan merujuk pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2022-2026 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2022 - 2026.

Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Kami menyadari Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD ini masih jauh dari sempurna disebabkan keterbatasan yang ada pada kami, maka sangat diharapkan saran maupun pendapat dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

Dumai, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
Pembina Tk. I
NIP.19840511 200212 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SATPOL PP TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan	16
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	17
2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	18
2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan	18
2.3.5 Formulasi Isu – Isu Penting	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	26
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	31
BAB V PENUTUP	42



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN NON URUSAN DAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5
TABEL T-C 29	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2022	8
TABEL T-C 30	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	15
TABEL 2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020	21
TABEL 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (RENJA-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hal ini untuk menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan renja, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Proses penyusunan rencana kerja meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja; (3) Penyusunan Rancangan Renja; (4) Pelaksanaan Forum/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja; (6) Penetapan Renja.

Renja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.



3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar hukum, yaitu :

- a. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Nomor 50 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829)
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
- j. Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 25 seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani Antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Daerah. Secara makro maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai berikut:

Maksud : Memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di Tahun 2024.

Tujuan :

1. Menyediakan data capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun 2024
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam bentuk dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA DUMAI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan Realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Renja Tahun Lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Renja Tahun berjalan.

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.603.365.028,- (Sembilan milyar enam ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah), dengan realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebesar Rp. 8.795.649.835,- (Delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) atau capaian realisasi 91,58%.

Tabel 2.1

Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Non Urusan Dan Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	URAIAN PROGRAM	KEUANGAN		
		PAGU (RP)	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.829.400	17.728.000	99,4
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.992.900	3.891.500	98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.375.000	2.375.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.943.200	2.943.200	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.922.500	1.922.500	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.479.500	2.479.500	100
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	4.116.300	4.116.300	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.632.694.028	5.871.897.132	88,5
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.628.186.328	5.867.389.432	88,5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.388.800	3.388.800	100



	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.118.900	1.118.900	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.714.600	3.714.600	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.834.500	1.834.500	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.880.100	1.880.100	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.100.000	44.100.000	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.100.000	44.100.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	322.235.596	321.811.695	98,8
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.758.800	6.758.800	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.009.600	60.009.600	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.290.696	74.030.696	99,7
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.072.500	19.072.500	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	23.040.000	23.040.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.064.000	138.900.099	99,8
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.149.600	37.216.892	95
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.149.600	37.216.892	95,06
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.579.928.000	1.543.285.862	97,6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.400.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.115.000	92.868.062	84,3
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.560.000	102.165.000	84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.342.853.000	1.342.852.800	99,9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.270.000	493.467.750	98,4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Operasional Atau Lapangan	286.980.000	282.084.000	98,2
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.290.000	19.290.000	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000	192.093.750	98,5
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	333.574.804	333.558.904	99,9
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	282.060.000	282.060.000	100



Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.458.900	35.443.000	99,9
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	16.055.904	16.055.904	100
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	128.869.000	128.869.000	100
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	28.000.000	28.000.000	100
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100.869.000	100.869.000	100
Total Anggaran	9.603.365.028	8.795.649.835	91,58

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan;
- c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai s.d. tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut.

**Tabel T-C 29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai**

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100 %							
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	5 Kasus	12 Bulan	5 Kasus	5 Kasus	100%	100 %	-	-
1.05.02.2.01.02	Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Bulan	1 Kasus	-	-	-	100 %	-	-



	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Kali	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana dan Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP	3 Orang		5 Orang	5 Orang	100%	100 %	-	-
1.05.02.2.01.07	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	-	-	-	-	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2..02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 %							
1.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Laporan	-	-	-	-	100 %	-	-
1.05.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	100 %	100 Usaha	100 %
1.05.02.2.02.03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	100 %	1 Kali	100 %



1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %							
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	-	-		100 %	1 Laporan	1 Laporan	



Dumai, Februari 2023

Kepala

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP
PembinaTk. I
NIP. 19840511 200212 1 001



Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2024 Khusus untuk Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, secara khusus tidak dianggarkan di sub kegiatan tersebut, dikarenakan pencapaian yang cenderung kecil pada tahun anggaran 2024. Kecilnya pencapaian tersebut dikarenakan untuk tahun 2024, Jumlah unjuk rasa dan Kerusuhan Massa yang terjadi dan di amankan oleh petugas Satpol PP pada Tahun 2023 hanya ada 1 kali kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa dan kerusuhan massa pada tahun 2023, dan 2024, penganggaran untuk sub kegiatan tersebut ditumpangkan dalam sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

Selain itu, pada tahun 2023 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, antara lain: Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota, serta Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia.

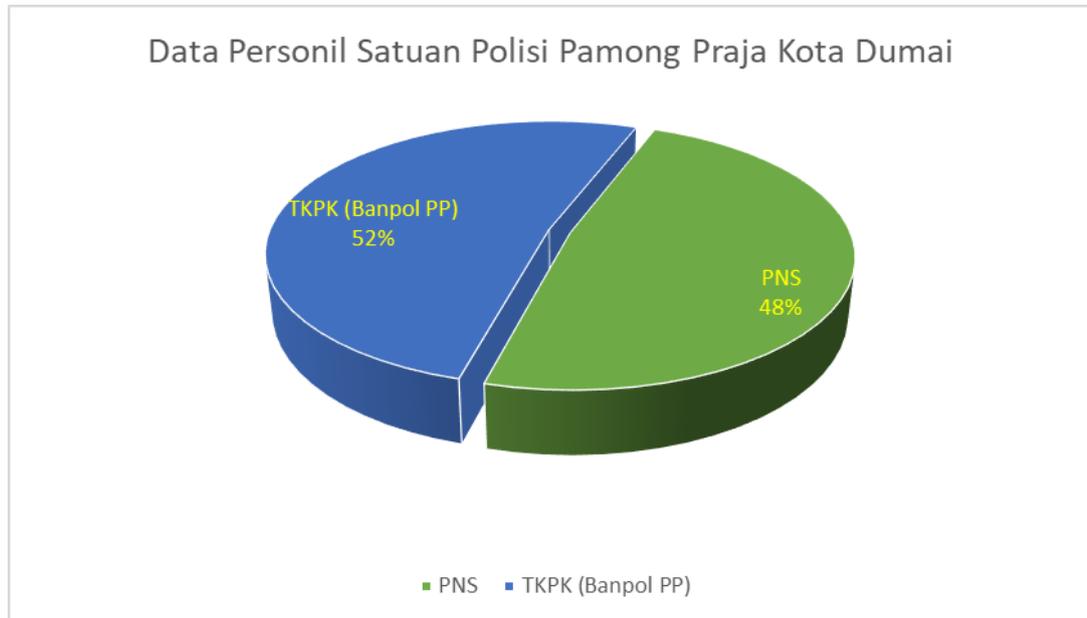
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, yang telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 25 seri D). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.



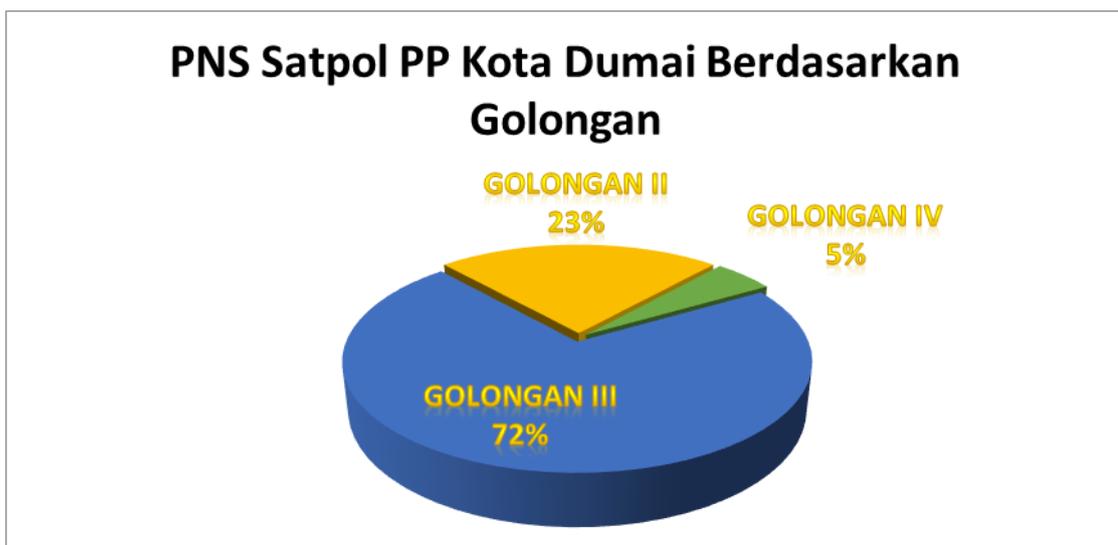
2.2.1 Sumber Daya yang tersedia

Jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini berjumlah 59 orang pegawai negeri sipil serta 63 orang TKPK Bantuan Polisi Pamong Praja. Komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gambar 2.1

PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, apabila di bedakan berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 Orang, Golongan III sebanyak 43 Orang dan Golongan II sebanyak 14 Orang

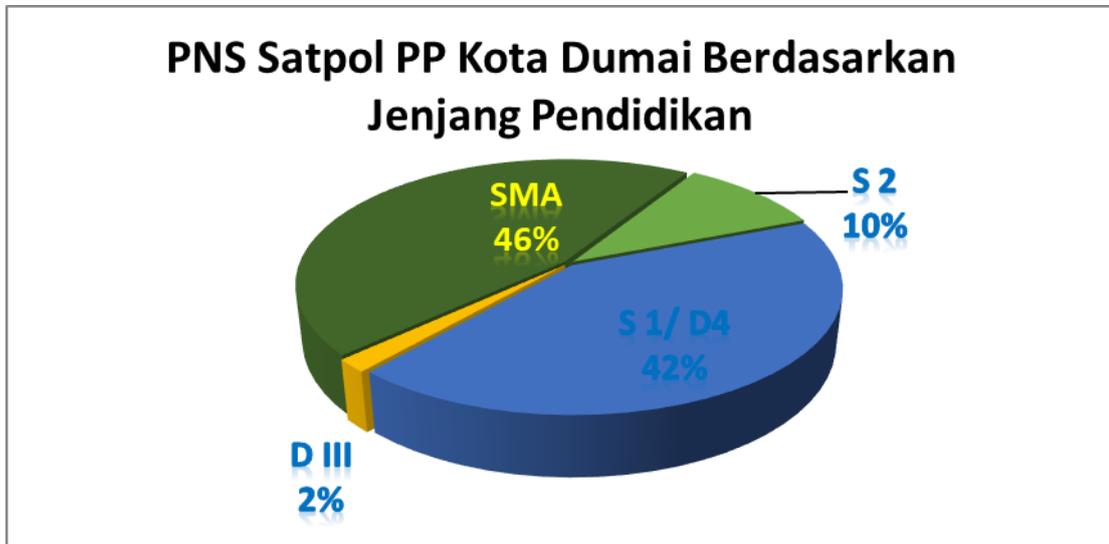


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 2.2



Sedangkan bila di data menurut Jenjang Pendidikan adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 6 Orang, Sarjana (S1/ D4) terdiri dari 25 Orang, D3 terdiri dari 1 Orang, dan SMA terdiri dari 27 Orang.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 2.3

2.2.2 Capaian tujuan, Sasaran, IKU dan SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP Kota Dumai sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Dumai menerapkan standar dan tolak



ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka standar pelayanan minimal Satpol PP diukur dengan 2 indikator yaitu Presentase berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten/kota dan Tingkat kepatuhan terhadap Perundang - undangan Daerah. Pengukuran hasil kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan utama ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam lampiran pada Tabel T-C.30 di bawah ini.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%		100	100	100	100	100	-	100	100	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman dan Keindahan)	%		100	100	100	100	100	-	100	100	
3.	Persentase penegakan peraturan daerah/perwako	%		100	100	100	100	100	-	100	100	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat Kinerja Pelayanan

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat;
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur;
- c. Maraknya kenakalan remaja yang ditandai dengan banyaknya ditemukan anak dibawah umur yang terjaring razia, serta minimnya pengawasan Orang tua terhadap anak. Hal itu mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang terjadi, seperti Tawuran, Balap liar, serta penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja berupaya memberikan edukasi,



Khususnya kepada pelajar di Sekolah Menengah Pertama, agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif dilingkungan sekitarnya.

- d. Tahun 2024 adanya pelaksanaan Pemilihan Umum, berupa Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif di awal tahun dan Pemilihan Kepala Daerah pada akhir tahun 2024.
- e. Kota Dumai akan menjadi Tuan Rumah pada pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Riau, dan demi kelancaran penyelenggaraan acara tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai akan menurunkan personil dalam upaya pengamanan pada acara tersebut.
- f. Agenda Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berupa HUT Satpol PP Tingkat Nasional pada tahun 2024 akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai akan mengirimkan personil dalam rangka memeriahkan perhelatan akbar tahunan tersebut.
- g. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai:

1. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kota Dumai dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Rasio Tenaga Pengamanan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk Kota Dumai belum terpenuhi secara optimal.
4. Rasio Kebutuhan Anggota Linmas 1 Anggota / RT belum dapat direalisasikan secara optimal mengingat keterbatasan anggaran daerah yang tidak berorientasi pada pengadaan Anggota Satlinmas.



5. Masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum,

3. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam memantapkan perwujudan otonomi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai perlu meningkatkan perannya dalam tugas keamanan, dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan/ keputusan walikota serta pengendalian operasional. Guna mempersiapkan program/ kegiatan kedepan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan Kota Dumai.

Visi Pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2024 adalah :

***“TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN
INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA
MELAYU”***

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan SATPOL PP Kota Dumai dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup nasional, regional maupun global.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan yang dirasa SATPOL PP Kota Dumai pada saat ini dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya dukungan masyarakat Kota Dumai dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- b. Maraknya Kenakalan Remaja di Kota Dumai
- c. koordinasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat belum sinergis dan terpadu;



- d. masih kurangnya tenaga PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum;
- e. masih terbatasnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal SATPOL PP Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Peran SATPOL PP sebagai Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat semakin strategis dalam menentukan terciptanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kota Dumai dengan didukung Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile;
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan strategis SATPOL PP;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Dumai;
5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia;
6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas.

5. Formulasi Isu-isu Penting

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan Permasalahan yang menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja adalah Produk hukum daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang masih rendah. Dalam menyikapi hal-hal yang



mengganggu ketentraman dan ketertiban tersebut harus didukung oleh kesiapan SDM, sarana dan prasarana yang memadai serta kebijakan-kebijakan strategis dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Strategi harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada lampiran tabel 2.4 di bawah ini :

**Tabel 2.4**

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA DUMAI**

SATPOL PP KOTA DUMAI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Terciptanya Kondisi yang Aman, Tenram, dan Tertib di Kota Dumai	100%	9.395.800.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	9.395.800.000	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100%	8.924.000.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai		8,974,000,000	
1.1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	5 Kegiatan	8.277.200.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Dumai	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5 Kasus	8.327.200.000	



Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Terlaksana	12 Bulan	25.000.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Bulan	25.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Terlaksananya HUT Satpol PP dan Linmas	2 Kegiatan	175.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	175.000.000	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Pelatihan Linmas yang Terlaksana serta Lomba Poskamling Tingkat Kota Dumai	2 Kali	150.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	150.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai	1. Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Terlaksana, 2. Terlaksananya Pelatihan Dasar Satpol PP	2 Kegiatan	36.800.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	136.800.000	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Terlaksana	12 Bulan	60.000.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	60.000.000	



	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	30.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	30.000.000	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Dumai	Tersusunnya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Dumai	Tersusunnya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai	Tersedianya Pelayanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	12 Bulan	150.000.000	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	20.000.000	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 %	360.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100 %	310.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Terlaksana	7 Kecamatan	50.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	1 Laporan	50.000.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Lengkap di Kota Dumai	200 Usaha	60.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 Laporan	60.000.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Kegiatan Tim Yustisi Dilaksanakan	2 Kali	250.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1 Laporan	200.000.000	



								dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %	111.800.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100 %	111.800.000	
3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat PPNS	3 Orang	111.800.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	111.800.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun seluruh OPD Kota Dumai yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan tingkat kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Secara umum, semua kebutuhan masyarakat yang tertampung pada hasil Musrenbang maupun melalui Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) telah terealisasi berdasarkan skala prioritas dan sudah diakomodir dalam Rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Namun karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka usulan yang diakomodir di dalam Renja sudah melalui penelaahan berdasarkan skala prioritas.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tewujudnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.	100 %	100 %	100%	100%	100%
				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



			2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).					
			3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan serta sebagai arahan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki, guna mendukung pembangunan daerah dan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan Satpol PP Kota Dumai.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Bidang – bidang, Sub. Bagian dan Seksi - seksi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024;
- b. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah yang berkeadilan;



- c. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai;
- d. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Menetapkan 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	
2	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	
2	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	
2	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	
2	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1	05	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1	05	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	



1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota



1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	2.01	07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS



B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang biasa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sehubungan diuraikan dalam Bab III, bahwa dalam 5 tahun ke depan tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada tahun 2024 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan visi misi Kota Dumai dan visi misi Walikota serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indicator sasaran, target yang ditetapkan pada tahun 2024 serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya Rencana kerja dan pendanaan ini, nantinya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan rencana aksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.



Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA DUMAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	100%	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	48.550.000		
2	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	18.000.000
2	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2.500.000
2	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.000.000



							Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
2	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000
2	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.750.000
2	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	17.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	6,842,233,879			100%	7.544.256.027
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang	6,832,233,879	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Bulan	7.490.756.027
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	17.000.000



1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	16.500.000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	16,500,000			100%	52.800.000
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	5.500.000
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	16.500.000
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu//mm		1 Laporan	16.500.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	0			100%	200.000.000
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	200.000.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	415,500,000			100%	547.500.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.000.000



1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	62,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	65.000.000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	75.000.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	22.000.000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	27.500.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	330.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	630.000.000	-		100%	605.000.000
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	125.208.000
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	120.000.000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	120.000.000



1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	120.000.000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	165.000.000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	200.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2,311,239,829			100%	1.804.600.000
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	6.600.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	98.000.000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,025,899,829	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	1.625.000.000



1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	247,000,000			100%	525.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	192,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Unit	285.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Unit	55.000.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	150.000.000
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	35.000.000
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai	100 %	0			100%	1.431.800.000



1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	5 Kasus	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Kasus	300.000.000
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Bulan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Bulan	25.000.000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	180.000.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	150.000.000



							dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Orang	40.000.000
1	05	02	2.01	07	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	60.000.000
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	30.000.000
1	05	02	2.01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	20.000.000



1	05	02	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	150.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	100%	0			100%	365.000.000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	50.000.000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	60.000.000
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	255.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan	100%	0			100%	111.800.000



1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	111.800.000
TOTAL									9,854,473,708				12.759.206.027



BAB V

P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2024, pagu rancangan awal yang di berikan hanya bisa mengakomodir Kegiatan Rutin Kantor, dan jumlah pagu tersebut belum bisa menganggarkan Program untuk Urusan Wajib Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang seharusnya menjadi Prioritas Utama dalam kegiatan penting mendukung Program Pembangunan Daerah Kota Dumai yaitu khususnya dalam Penegakan Perda dan perkara Kota Dumai pada Program Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya.

5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menjaga sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di RPJMD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
2. Sebagai pedoman dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021



tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah

3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berkewajiban untuk melaksanakan program program Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) Tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dan Kepala OPD mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Walikota Dumai.

Dumai, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

The image shows a circular official stamp of the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA DUMAI' around the perimeter and 'SATUAN POLISI PAMONG PRAJA' in the center. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP.19840511 200212 1 001